

BAB II

GAMBARAN UMUM KOREA SELATAN DAN KOREA

UTARA

Setelah Jepang membangun Pemerintah Penjajahan Jepang di Korea, Jepang merampas masyarakat Korea serta melarang memakai bahasa Korea dan nama Korea dalam rangka mengasimilasikan masyarakat Korea dengan masyarakat Jepang. Saat itu Pasukan Kemerdekaan yang bertempat di Cina dan Rusia, terus-menerus berjuang, bahkan Pemerintah Korea Sementara diresmikan di Cina, hingga memimpin gerakan kemerdekaan. Gerakan Kemerdekaan 1 Maret yang dilaksanakan di seluruh Korea pada tahun 1919, terkenal sebagai gerakan tanpa senjata terhadap tentara dan polisi Jepang yang bersenjata. Setelah pasukan Jepang pulang ke Jepang se usai Perang Dunia ke-2 di tahun 1945, masa penjajahan Jepang selesai.

Setelah Korea merdeka di tahun 1945, pasukan Amerika Serikat dan pasukan Uni Soviet, mendirikan pemerintahan militer di bagian selatan dan di bagian utara semenanjung Korea, hingga benih perpecahan Korea ditaburkan. Dengan hasil pemilihan umum, di Korea Selatan, lahir pemerintahan baru berlandaskan sistem demokrasi dan kapitalisme di tahun 1947 lalu.

Sementara itu, di Korea Utara, atas dukungan Uni Soviet, lahir pemerintahan yang berdasarkan komunisme. Akibat penyerangan oleh Korea Utara, Korea mengalami perang mulai tahun 1950 hingga tahun 1953. Keikutsertaan pasukan PBB dan pasukan Cina, mencapai perjanjian gencatan senjata dan pembagian semenanjung Korea terus berlangsung hingga sekarang.

Dominasi yang besar pasca perang Dunia II menempatkan dua negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dan kekuatan ini membentuk polarisasi masing-masing kutub yang berseberangan secara ideologis. Konflik di Korea juga menjadi ajang perebutan kedua negara adidaya tersebut. Disaat menjelang akhir Perang Dunia II, tercapai persetujuan rahasia antara Amerika dan Uni Soviet untuk membagi wilayah Korea dalam dua bagian untuk memudahkan operasi militer. Amerika Serikat akan menerima penyerahan tentara Jepang di sebelah selatan garis tersebut, sementara Soviet menerima penyerahan pasukan Jepang disebelah garis utara. Tetapi masalah segera muncul setelah Soviet menggunakan kesempatan untuk mendapatkan daerah pengaruh dengan mendirikan pemerintah boneka di Korea Utara. Soviet memiliki tujuan untuk memperluas paham komunisnya.

Terlepas dari masa perang dingin, Korea Selatan dan Korea Utara mengakui ideologinya masing-masing dan membuka ufuk baru masa perdamaian, rekonsiliasi dan hubungan kerjasama antar Korea.

A. Keadaan Umum Korea Selatan

Republik Korea (ROK) atau Korea Selatan, terdiri dari setengah bagian selatan dari semenanjung Korea di Asia Timur dan banyak pulau letaknya di bagian barat dan pantai selatan. Pada akhir tahun 1970-an Negara kapitalis ini masuk kedalam 12 negara terbesar dalam perdagangan dan Negara pengekspor utama dari mobil, elektronik, komponen-komponen computer yang sebagian besar berorientasi ekspor yang dipegang oleh kelompok bangsawan yang disebut chaebol. Sejak tahun 1987, Korea Selatan telah tumbuh sebagai Negara demokrasi multipartai, dan pemerintah telah melakukan usaha perdamaian dan perdagangan dengan rezim Korea Utara.

Sejak awal unifikasi dua Korea pada abad ke 7 hingga abad ke 21 oleh ketiga leluhur bangsa Korea, Korea merupakan sebuah Negara yang independen. Namun pada tahun 1905, ketika terjadi perang Jepang-Rusia, Korea dijadikan daerah perlindungan oleh para penjajah Jepang, dan pada tahun 1910 Jepang menjadikannya sebagai daerah jajahan. Kemudian Korea mendapatkan kembali kemerdekaannya ketika Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan ekutunya pada tahun 1945.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, berdiri sebuah Negara yang bernama Republik Korea (Republik of Korea) di semenanjung Korea bagian selatan. Sementara di bagian Utara didirikan sebuah Negara dengan system pemerintahan yang berideologikan komunis yakni Korea Utara (DPRK). Selama perang Korea berlangsung(1950-1953), Tentara Amerika Serikat dan Pasukan PBB bertempur

bersama tentara Korea Selatan untuk menghadapi serangan dari Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan China.

Sebuah gencatan senjata telah terjadi pada tahun 1953, memisahkan semenanjung Korea sepanjang garis demiliterisasi yakni pada garis lintang 38. Sesudah pemisahan tersebut, Korea Selatan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cepat dimana pendapatan per kapita meningkat tajam dibandingkan Korea Utara. Pada tahun 1993, Kim Young sam menjadi presiden sipil pertama setelah 32 tahun Korea Selatan dipegang oleh pemimpin militer. Pada masa kini, Korea Selatan telah menjalankan fungsinya sebagai sebuah Negara demokratis yang modern. Korea Selatan melewati masa kekacauan pada tahun 1960-an, mencapai pertumbuhan ekonomi yang dijuluki 'Keajaiban Sungai Han' di tahun 1970-an dan memperoleh demokrasi lewat sistem pemilihan presiden secara langsung di akhir tahun 1980-an. Korea Selatan kemudian tumbuh menjadi Negara dengan sistem pemerintahan yang demokratik sedangkan Korea Utara mengukuhkan diri sebagai Negara sosialis.

Pada tahun 2000, sebuah sejarah pertemuan tingkat tinggi Utara-Selatan dilaksanakan dimana Presiden Korea Utara Kim Dae jung bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong il. Pada tahun 2007, pertemuan tingkat tinggi Utara-Selatan kembali dilaksanakan kali ini dihadiri oleh Presiden Korea Selatan Roh Moo hyun dan pemimpin Korea Utara. Penolakan dan keengganan Korea Utara untuk mengadakan perjanjian dengan Presiden Korea Selatan Lee Myung bak yang dilantik pada Februari 2008 membuat hubungan kedua Korea semakin menegang.

1. Kondisi Geografis Korea Selatan

Korea Selatan terletak di Benua Asia Timur tepatnya di bagian selatan semenanjung Korea, yaitu pada garis Lintang Utara 33° - 38° dan 124° - 132° Bujur Barat. Berbatasan dengan Laut Kuning di bagian utara dan Laut Kuning di bagian selatan. Luas Korea Selatan adalah 99.274 km^2 , lebih kecil dibanding Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar bergunung-gunung dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti sungai Han dan sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk. Bukit-bukit rendah menjadi ciri utama di daerah selatan dan barat, serta gunung-gunung yang lebih tinggi terdapat di daerah timur dan utara. Sumber daya Alam yang dimiliki oleh Korea Selatan antara lain batu bara, grafit, molybdenum, timah, dan tenaga hydropower.

Iklm di Korea bersifat iklim benua dan juga iklim samudra. Perubahan 4 jenis musim sangat jelas, hingga panas dan lembab di musim panas, sedangkan dingin dan kering di musim dingin. Musim panas di Korea selatan yang dimulai bulan Juni bisa mencapai temperatur 40 derajat celcius (di kota Daegu), yang ditandai dengan datangnya musim hujan yang jatuh pada akhir bulan Juli sampai Agustus di seluruh bagian semenanjung. Sementara temperatur musim dinginnya rata-rata dapat jatuh pada suhu sejauh minus 10 derajat celcius di beberapa propinsi. Masa yang paling dingin dalam setahun, mulai bulan Desember hingga bulan Februari. Di musim dingin masyarakat Korea bisa menikmati olahraga di musim dingin dan pariwisata salju. Di kawasan pegunungan daerah timur, salju

cukup banyak turun, hingga daerah permainan ski dan kawasan papan luncur salju dapat dinikmati pada musim ini.

Korea Selatan juga rentan akan serangan angin taifun yang menerjang selama musim panas dan musim gugur. Beberapa tahun belakangan ini Korea selatan juga sering dilanda badai pasir kuning yang dibawa dari gurun gobi di Cina yang juga melanda Jepang dan Amerika Serikat. Masalah lingkungan yang dihadapi Korea Selatan pada masa sekarang ini adalah polusi udara di kota-kota besar di Korea Selatan, hujan asam, serta pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah buangan industri.

Untuk menghadapi masalah-masalah lingkungan tersebut, Korea Selatan aktif berpartisipasi dalam forum-forum dan perjanjian internasional seperti Protokol Lingkungan Antartika, Traktat Antartika, Biodiversity, Perubahan iklim, Protokol Kyoto- Perubahan iklim, Perubahan lingkungan, limbah-limbah berbahaya, Hukum Laut, Perjanjian perlindungan lapisan Ozon, Polusi Kapal, dan lain-lain.

2. Sistem Politik Korea Selatan

Sistem pemerintahan Korea Selatan adalah Republik Konstitusional dengan system presidensi yang kuat. Sistem Hukum Korea Selatan menggabungkan elemen-elemen Hukum Sipil Benua Eropa, Hukum Anglo-Amerika, dan pemikiran China klasik. Kepala Negara Republik Korea Selatan

adalah Presiden. Selain menjadi kepala Negara, presiden juga menjadi kepala komando militer. Presiden juga mempunyai kekuasaan eksekutif dan dapat menunjuk perdana menteri dengan persetujuan parlemen.

Badan eksekutif terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan tugas-tugasnya dibantu oleh menteri-mentri yang terdapat dalam dewan kabinet. Sejak tanggal 25 Februari 2008, kepala Negara dijabat oleh Presiden Lee Myung Bak. Sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri Han Seung-soo. Presiden Anggota dewan Kabinet ditetapkan oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Pemilihan Umum Presiden dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak. Pemilu terakhir dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2007. Perdana menteri ditentukan oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional.

Badan legislatif di Korea Selatan terdiri dari parlemen satu kamar yakni Majelis nasional (National Assembly) atau Kukhoe terdiri dari 299 anggota. 243 Anggotanya dipilih dipilih langsung oleh rakyat dengan masa tugas 4 tahun, dan 56 sisanya didistribusikan secara proporsional oleh partai yang memenangkan 5 kursi atau lebih. Badan Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dimana Hakim diangkat oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Mahkamah konstitusional, dimana Hakim diangkat oleh presiden berdasarkan pada nominasi yang ditetapkan oleh majelis Nasional.

Setelah merdeka pada tahun 1948 Korea Selatan dipimpin oleh pemerintahan sipil, yaitu Presiden Syngman Rhee. Namun pemerintahan tersebut dikudeta oleh rezim militer yang dipimpin oleh Mayor Park Chung Hee. Setelah kematian Presiden Park Chung Hee, Korea Selatan kembali berada dibawah pemerintahan Militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo Hwan. Namun setelah adanya desakan dari masyarakat Korea Selatan akhirnya rezim militer mundur dan dilaksanakan Pemilu pertama di Korea Selatan tahun 197 yang memilih Roh Tae Woo sebagai Preaiden Korea Selatan. Kemudian Korea Selatan dipimpin oleh Presiden sipil pertama, Kim Young Sam setelah 30 tahun dipimpin oleh militer. Pada masa pemerintahannya, Kim Young Sam memajukan proses reformasi demokrasi, menghapuskan praktek penyuapan dan korupsi dalam pemerintahan.

Pemilihan presiden selanjutnya dilaksanakan pada desember 2007, ditengah krisis moneter yang mengguncang ekonomi Korea Selatan. Dibawah pimpinan presiden Kim Dae jung perekonomian Korea Selatan mengalami recovery dari krisis ekonomi 1997-1998, beberapa institusi yang lebih demokrasi dibentuk.

Partai politik di Korea Selatan antara lain Partai Demokrat (Democratic Party) yang diketuai oleh Chung Sye kyun. Partai Demokrat dulunya bernama Partai Demokrat Bersatu atau UDP (United Democratic Party). Kemudian Partai Buruh Demokrat (Democratic Labor party) yang diketuai oleh Kang Ki kabi. Grand National Party (GNP) yang diketuai oleh Kang Jae sup. Liberty Forward Party (LFP) yang diketuai oleh Lee Hoi Chang. Aliansi Pro Park yang dipimpin

oleh Suh Choung Won, renewal Korea party (RKP) yang diketuai oleh moon Kook hyun.

Di Korea Selatan juga terdapat beberapa kelompok penekan diluar partai politik yang mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Kelompok-kelompok tersebut antara lain Federasi industry-industri Korea (Federation of Korean industries), Federasi serikat dagang Korea (Federation of Korean Trade Unions), Konfederasi serikat dagang Korea (Korean confederation of Trade Unions), Dewan gereja nasional Korea (Korean National Council of Churches); Asosiasi Pedagang Korea (Korean Traders Association); Asosiasi Veteran Korea (Korean Veterans' Association); Dewan Serikat Kerja Nasional (National Council of Labor Unions); Aliansi Demokrasi Nasional Korea (National Democratic Alliance of Korea); Federasi Persatuan Petani Nasional (National Federation of Farmers' Associations); Federasi Persatuan Pelajar Nasional (National Federation of Student Associations).

Untuk mewakili kepentingan Korea Selatan di Luar negeri, Korea Selatan menempatkan perwakilan-perwakilan diplomatic diberbagai Negara termasuk di Indonesia. Kemudian juga ikut berpartisipasi dalam organisasi-organisasi internasional, antara lain: APEC, UN, UNCTAD, ADB, WHO, WTO, ASEAN (dialogue member), Australia Group, FAO, G-20, IBRD, IAEA, dan lain-lain.

3. Ekonomi Korea Selatan

Perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1960 telah mencatat rekor pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, membuat Korea Selatan menjadi salah satu Negara yang memiliki kemajuan ekonomi terbesar ke-12 di seluruh dunia. Perkembangan ini terutama ditentukan lewat integrasi negara ini kepada perekonomian dunia yang modern dan berteknologi tinggi. Saat ini pendapatan perkapita Korea Selatan telah setara dengan pendapatan negara-negara Uni Eropa. Empat decade yang lalu, GDP perkapita Korea Selatan masih dibandingkan di tingkat Negara-negara miskin di Asia dan Afrika. Namun, di tahun 2004, Korea Selatan tergabung dalam klub trilyun dollar di dunia perekonomian. Pada tahun 2008, pendapatan per kapita Negara ini dapat disamakan dengan Republik Ceko dan Selandia Baru.

Kesuksesan ini diraih bermula selama kurun waktu 1980-an, Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan dukungan terhadap industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi. Namun demikian, seiring dengan gelombang krisis ekonomi yang melanda Asia, Korea Selatan tidak terkecualikan sebagai salah satu negara yang terkena krisis. Rasio hutang yang tinggi, pinjaman yang tinggi, serta ketidakdisiplinan sektor ekonomi telah menjatuhkan perekonomian Korea Selatan pada tahun 1998.

Dipengaruhi oleh belanja konsumen dan ekspor, pertumbuhan ekonomi di tahun 2002 sangat mengesankan yakni sebesar 7 % meskipun pertumbuhan ekonomi global sedang lesu. Antara tahun 2003 hingga tahun 2007, pertumbuhan ekonomi rata-rata 4 sampai 5 % tiap tahunnya. Kecenderungan pembelanjaan konsumen yang menurun telah diimbangi oleh pertumbuhan ekspor yang sangat cepat.

Pada tahun 2005, pemerintah membuat proposal tentang pengesahan reformasi kaum buruh dan skema dana pensiun perusahaan untuk membuat pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Pemerintah juga memperkenalkan kebijakan real-estate untuk mendinginkan spekulasi yang dibuat oleh sektor properti. Perkembangan yang positif ini dibarengi dengan berbagai upaya restrukturisasi di sektor keuangan, korporasi dan publik. Pemulihan ekonomi Korsel yang berlangsung cepat tersebut sebagian besar juga didukung dengan penerapan kebijakan suku bunga yang rendah dan stabilisasi pasar domestik. Kebijakan ini pada gilirannya mendorong iklim investasi dan permintaan domestik.

Di 2005, selain merupakan pemimpin dalam akses internet kecepatan-tinggi, monitor layar-datar dan telepon genggam, Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif dan keenam dalam baja. Negara ini juga dalam peringkat ke-12 dalam PDB nominal, tingkat pengangguran rendah, dan pendistribusian pendapatan yang relatif merata.¹¹

¹¹ <http://www.wikipedia.com>

Secara umum, perekonomian Korea Selatan lewat ditandai lewat tingkat Inflasi yang moderat, tingkat pengangguran yang rendah, surplus dari ekspor, dan pendistribusian pendapatan yang merata. Semua ini menandakan solidnya perekonomian Korea Selatan.

Pada September 2008, Korea Selatan kembali terkena dampak kekacauan ekonomi global. Harga-harga saham jatuh lebih dari 40% dan nilai mata uang Won anjlok pada perkiraan 26%. GDP Korea Selatan tenggelam pada kuartir keempat dan pertumbuhan GDP pada tahun tersebut hanya 2.5%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memulihkan perekonomiannya, pemerintah Korea Selatan mengadopsi beberapa langkah-langkah untuk menstimulasi ekonomi.

Salah satu hal yang unik dalam ekonomi Korea Selatan adalah peranan *chaebol* (konglomerat) yang mendominasi sejak lama dan kebanyakan didirikan setelah Perang Korea. Pada 1995, di antara 30 atas *chaebol*, empat grup teratas Hyundai, Samsung, Daewoo, dan LG Group. Pada 2003, hanya 4 dari 18 *chaebol* terbesar tetap berjalan. Namun, mereka tetap mendominasi aktivitas ekonomi. *Chaebol* Korea Selatan sering dibandingkan dengan *keiretsu* Jepang. Perbedaannya adalah *chaebol* Korea masih dipegang oleh keluarga pendiri, tidak seperti *keiretsu*, yang dijalankan oleh manajer perusahaan profesional.

Perbedaan kedua adalah pemerintah mencegah *chaebol* memiliki bank pribadi, sedangkan *Keiretsu* bekerja sama dengan bank tertentu, memberikan perusahaan tersebut mencari kredit yang tidak terbatas.

Sebagai salah satu Negara industri maju di Asia, Industri-industri besar di Korea Selatan meliputi : Industri elektronik, produksi otomotif, bahan kimia, kapal, baja, tekstil. Selain di bidang industry, perekonomian Korea Selatan juga ditunjang oleh sektor agrikultur yang maju. Hasil-hasil pertanian Korea Selatan antara lain Beras, tanaman akar-akaran, barley, sayuran, ternak, ikan. Komoditi ekspor Korea Selatan telah mencakup ke Negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Produk-produk ekspor unggulan Negara ini yaitu meliputi produk elektronik, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, baja, kapal, tekstil.

B. Keadaan Umum Korea Utara

Democratic people's Republik of Korea (DPRK) atau sering disebut juga Korea Utara adalah Negara komunis dengan sistem dictator. Negara ini memperoleh kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Kepala negaranya adalah Kim Jong Il sejak Juli 1994. Pada tanggal 9 April 2009 majelis Perwakilan Rakyat memilih ulang Kim Jong Il sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional, yaitu sebuah kedudukan yang sama dengan kekuasaan administratif Negara yang tertinggi. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Kim Yong Il sejak April 2007 sampai sekarang.

Sebelum diduduki oleh Jepang pada tahun 1905, Korea adalah sebuah kerajaan yang merdeka. Pada tahun 1910 Jepang secara resmi telah menguasai wilayah semenanjung Korea. Pada saat terjadinya Perang Dunia II, Semenanjung Korea terbagi dua dimana separuh daerah utara berada dibawah kendali

pendukung komunis Soviet. Setelah kekalahan dalam Perang Korea (1950-1953) untuk menaklukkan Republik Korea (RoK) dengan kekuatan militer, Korea Utara dibawah pemimpinannya Kim Il Sung, mengadopsi sebuah kebijakan diplomasi nyata dan sistem ekonomi "Percaya Diri" sebagai pencegah masuknya pengaruh dari luar. Korea menganggap AS sebagai ancaman terhadap sistem sosial. Putra Kim Il sung, penguasa saat ini Kim Jong Il, secara resmi telah menjadi penerus ayahnya sebagai pemimpin Korea Utara, bertanggung jawab atas pertumbuhan politik dan peran kepemimpinan hingga Kim Il sung meninggal pada tahun 1994.

Dengan berakhirnya perang dingin, runtuhnya Uni Soviet, meluasnya demokratisasi di Eropa Timur, reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur, normalisasi hubungan Korea Selatan dengan Negara-negara penganut paham komunis termasuk Cina, telah membawa pengaruh yang sedemikian besar bagi Korea Utara. Jurang ekonomi pernah muncul antara dua Korea menjadi masalah yang tidak sepele bagi keberlangsungan system Korea Utara. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem Korea Utara yang dulunya aman tetapi saat ini tidak lagi.

Ketahanan system Korea Utara terletak pada 3 faktor: pertama, masyarakat sipil Korea Utara begitu terbelakang sehingga mereka tidak menyadari perlunya menentang Rezim Kim Il Sung. Kedua, Korea Selatan, secara luas menyadari hambatan domestik tidak mempunyai keinginan untuk meruntuhkan system Korea Utara dan mempercepat reunifikasi. Ketiga, Negara-negara besar diwilayah semenanjung Korea tidak menginginkan adanya masalah dalam hubungan antar Korea.

Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana Korea Utara sebagai negara sosialis dikelilingi oleh negara dengan ekonomi liberal yang berpendapatan tinggi, namun Korut sendiri tidak terpengaruh oleh liberalisasi negara-negara tetangganya. Salah satu elemen substansial yang dimiliki Korea Utara adalah ideologi juche. Ideologi inilah yang membentuk sistem ekonomi Korea Utara yang self reliance dan pertahanan yang self defence. Dengan juchenyanya ini, Korea Utara hanya akan melakukan perdagangan secara terbatas, walaupun bukan tidak sama sekali, serta berusaha senantiasa memperkuat pertahanannya dengan cara-cara yang oleh dunia internasional dianggap sebagai cara yang provokatif. Juche dibentuk Kim Il Sung dengan tujuan awal untuk mendirikan Korut yang tangguh dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi maupun militer sendiri sehingga tidak memerlukan campur tangan ketiga negara yang dianggap musuh oleh Korea Utara yakni Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Identitas nasional Korea Utara atau Juche inilah yang menjadi faktor penting yang mempengaruhi kebijakan Korea Utara baik keluar maupun ke dalam. Juche ini selain menempatkan Jepang dan Korea Selatan sebagai musuh utama Korea Utara, juga merupakan batu landasan untuk provokasi proliferasi maupun peluncuran rudal Korea Utara, serta alasan utama isolasi ekonomi yang diterapkan Korea Utara.



1. Kondisi Geografis Korea Utara

Korea Utara menguasai wilayah bagian Utara dari garis demarkasi militer yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata pada Juli 1953, saat Perang Korea berakhir. Menurut UU Korea Selatan, wilayah kekuasaan nasional termasuk didalamnya adalah seluruh daratan Semenanjung Korea dan kepulauan di sekitarnya. Dengan demikian Korea Selatan menganggap wilayah Korea Utara sebenarnya masuk ke wilayah kekuasaan Korea Selatan, meskipun sekarang dikuasai oleh Korea Utara.

Negara yang beribu kota Pyongyang ini terletak di sisi sebelah utara semenanjung Korea. Berbatasan dengan laut Jepang disebelah Timur, Laut Kuning disebelah barat, Cina dan Rusia disebelah Utara dan garis demarkasi 38 derajat disebelah selatan. Luas wilayah Korea Utara 120,540 km², dengan luas daratan 120.410 km² dan wilayah perairan seluas 130 km².

Korea Utara merupakan wilayah yang beriklim sedang dengan curah hujan terpusat pada musim panas. Walaupun Korea Utara terletak di zona beriklim sedang, musim dingin sangat dingin dan musim panas terlalu panas gara-gara pengaruh iklim benua. Musim dingin di Korea Utara berlangsung selama 5 bulan, hampir sebulan lebih panjang daripada Korea Selatan. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan yaitu sering terjadi banjir, dan kadang terjadi angin topan selama musim hujan.

Selain itu masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh Korea Utara antara lain polusi air, suplai air bersih yang tidak mencukupi, penebangan hutan

secara liar, erosi lahan dan penurunan lahan. Usaha yang dilakukan Korea Utara untuk menyelesaikan masalah lingkungan salah satunya dengan ikut serta dalam perjanjian internasional tentang lingkungan, antara lain Traktat Antartik, Biodiversity, Perubahan iklim, Protokol Kyoto, dan Polusi Kapal.

Barang tambang utama Korea Utara antara lain: molybdenum, magnesite, grafit, barit, mika, fluorite, perak, besi, timah, seng, aluminum, batu bara, dan lain-lainnya. Timah dan seng adalah produk utama dalam ekspor Korea Utara. Hampir separuh cadangan dalam tanah dari total produk magnesite dunia diproduksi di Korea Utara. Batu bara, salah satu sumber energi utama Korea Utara, banyak ditemukan di seluruh pelosok negeri Korea Utara. Sebagian besar batu bara adalah anthracitic (batu bara keras). Cadangan Batu Bara Lunak dalam tanah sebagian besar terdapat di Aoji propinsi Hamgyung Utara dan daerah Anju propinsi Pyongan Selatan.

Walaupun Korea Utara dipercayai kemungkinan memiliki cadangan minyak dalam tanah, tetapi keuntungannya apabila di eksplorasi belum dapat dipastikan. Ada perusahaan pengeboran minyak luar negeri yang menjajaki dan mengeksplorasi ladang minyak di Korea Utara sampai sekarang, namun belum ada hasil yang menonjol.

2. Sistem Politik Korea Utara

Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il (1994) adalah salah satu negara sosialis otoritarian, dimana kepemimpinan dipegang oleh seorang pemimpin tertinggi yang masih eksis pada saat ini. Dengan populasi sebanyak 22,665,345 orang (2009)¹², secara rasial homogeni, terdapat sejumlah kecil kelompok China dan keturunan Jepang yang menganut agama Budha dan Konfusianisme. Selain itu terdapat beberapa kelompok penganut agama Kristen dan sinkretis Chondogyo (Ajaran Jalan Surga).

Politik reunifikasi nasional secara jelas telah digunakan sebagai alat politik untuk menjaga sistem tersebut. Dengan strategi politik penyatuan telah menghasilkan efek melegitimasi, memerintah, mengindoktrinasi, dan memobilisasi aturan Kim Jong Il. Kebijakan penyatuan Kim selalu melibatkan kebijakan dua tujuan yaitu mengeluarkan pasukan Amerika dari Korea Selatan dengan membujuk Korea Selatan melalui perundingan tingkat tinggi dan menciptakan instabilitas di Korea Selatan sehingga dapat menyatukan kedua Korea di bawah pemerintahannya dulu. Karakteristik sistem politik Korea Utara dapat dilihat dari 3 hal berikut dibawah ini, yaitu:

1) Politik dikuasai oleh satu Partai

Pemerintahan oleh satu partai adalah ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di masa lalu. Partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan

¹² <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/KN.html#top>

nasional, dimana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif dan yudikatif secara keseluruhan. Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, Korea Utara bisa dikatakan sebagai 'negara yang dipimpin partai'. Walaupun ada lebih dari satu partai, namun mereka bukan kubu oposisi, tetapi mitra partai yang berkuasa.

Pemerintah Korea Utara dikuasai oleh Partai Buruh Komunis atau Communist Workers Party (KWP), dimana seluruh penyelenggara pemerintah berasal meskipun terdapat juga partai politik minor. Kabinet sebanyak 43 terdiri dari 3 Komite, 27 Menteri, 1 Badan, 1 Bank dan 2 Biro. Lembaga Perwakilan adalah Majelis Agung Rakyat atau Supreme People's Assembly (678 deputi) dengan masa tugas 5 tahun. Struktur kekuasaan sebenarnya tidak terlalu jelas.

Korea Utara secara resmi dipimpin oleh Perdana Menteri, tetapi kekuasaan yang sebenarnya terletak pada Ketua Komisi Pertahanan Nasional yang juga sebagai pemimpin tertinggi yang dipegang Kim Jong Il. Konstitusi yang berlaku disusun pada tahun 1948, direvisi total pada 27 Desember 1998. Pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, Pong Cu (sejak 3 September 2003) dan secara teori Central People's Committee (CPC), adalah pembuat keputusan pemerintah tertinggi. CPC dikepalai oleh seorang presiden yang juga mengangkat anggota komite yang lain. Tugas Komite Rakyat Pusat (CPC) adalah membuat kebijakan dan mengawasi kabinet (Naegak) atau Dewan Administrasi Negara, State

Administration Council (SAC). Dewan Administrasi Negara ini dipimpin oleh perdana menteri dimana anggotanya ditunjuk oleh Mahkamah Agung Rakyat.

Secara resmi parlemen atau lembaga Supreme People's Assembly (Ch'oeo Immin Hoewi) adalah lembaga tertinggi kekuasaan Negara. Kim Yong Nam terpilih sebagai Ketua pada 5 September 2003 dan diberikan tanggung jawab untuk mewakili Negara dan menerima mandat. Mahkamah Agung Rakyat ini mempunyai 687 anggota yang dipilih oleh pemilihan umum. Biasanya lembaga ini mengadakan 2 kali meeting tahunan, yang berlangsung dalam beberapa hari dengan agenda meratifikasi keputusan yang dibuat oleh KWP. Sebagai salah satu rezim komunis garis keras yang tersisa didunia, pemimpin Korea Utara yang terdahulu Kim Il Sung selalu memprioritaskan keamanan nasional selama beberapa dekade pemerintahannya. Setelah pengubahan mandat nasional menjadi pandangan politik, ia telah sukses menggunakan ideologi komunis dan *juche* sebagai alat untuk mempertahankan Negara.

2) Penguasa Tunggal

Penguasa tunggal adalah ciri khas kediktatoran. Kekuasaan negara terkonsentrasi pada partai, dan kekuasaan didalam partai itu dimiliki oleh satu orang secara eksklusif. Penggunaan istilah "Yuil" yang berarti 'tunggal' atau 'mono' dalam bahasa Korea Utara sebenarnya adalah 'sistem ideologi tunggal' berasal dari filsafat 'pemimpin tunggal'. Dalam masyarakat Korea Utara, pemimpin adalah lambang perwujudan tekad dan

keinginan partai, dan merupakan pusat kekuatan untuk mengorganisir dan memimpin kegiatan sosiopolitik secara terpadu dan secara utuh. Oleh karena itu, peranan dan kekuatan pemimpin ditempatkan pada posisi teratas dan posisi yang tidak bisa ditantang.

3) Kekuasaan Dinasti

Sistem unik dimiliki oleh Korea Utara. Karena Kim Jong-il memiliki kemampuan sebagai pemimpin yang mewariskan filsafat, bakat dan ajaran dari ayahnya secara sukses, membuat dinegara itu berjalan suatu sistem kekuasaan tunggal yang diwariskan dari ayah ke anak. Persiapan untuk mewariskan kekuasaan sudah dilaksanakan sejak awal tahun 1970an. Sistem itu disempurnakan saat Kim Il-sung mengatakan bahwa "Kim Jong-il memiliki kemampuan penuh untuk menangani semua tugas (sebagai pemimpin)".

Setelah kematian ayahnya Kim Il-sung, dan Kim Jong-il dilantik sebagai sekretaris umum Partai Buruh Korea pada Oktober 1997, maka sistem pewarisan terwujud secara sukses saat Kim Jong-il menjabat sebagai ketua Komisi Pertahanan Nasional pada September 1998.

3. Kondisi ekonomi Korea Utara

Korea utara adalah salah satu Negara yang secara ekonomi paling terpusat dan terisolasi dimana pada saat ini menghadapi titik terendah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Korea Utara bersumber pada pertanian; 30.4%, industri; 32.3%, 37.7% pada pertambangan. Pendapatan perkapita Korea Utara di tahun 2008 diperkirakan 1700 US dollar. Stok modal industri mendekati titik bawah karena tidak tersedianya deinvestasi dan kekuarangan suku cadang. Hasil industri Korea Utara semakin tahun menurun.

Negara ini telah mengalami kekurangan pangan selama hampir satu dekade karena tanah yang tidak subur, pertanian kolektif, masalah yang muncul karena iklim, termasuk kekeringan panjang pada tahun 2000 dan kritisnya persediaan pupuk dan bahan bakar. Bantuan pangan internasional secara besar-besaran telah menyelamatkan Korea Utara dari kelaparan sejak tahun 1995-1996, tetapi masyarakat masih menderita kekurangan gizi dan kondisi kesehatan yang buruk. Belanja militer yang besar-besaran telah mengalahkan belanja investasi dan konsumsi rakyat. Pada tahun 2003 memanasnya hubungan Korea Utara dengan beberapa Negara donor pangan dan bahan bakar telah menyebabkan bantuan menurun drastis ke Korea Utara.

Tidak tersedianya data yang pasti tentang kondisi ekonomi Korea Utara, beberapa Negara memperkirakan kondisi perekonomian Korea Utara dengan spekulasi bahwa berdasarkan data yang disampaikan pada tahun 1970 sampai dengan awal 1990an telah mengalami kemerosotan yang drastis. Dengan

terhapusnya perdagangan dan bantuan dari uni soviet, absennya perdagangan dengan Negara lain, dan gagalnya beberapa panen telah menimbulkan bencana ekonomi bahkan jauh sebelum bencana kelaparan tahun 1995.

Masalah ekonomi paling serius yang dihadapi Korea Utara pada pertengahan 1990an adalah kurangnya produksi pangan untuk konsumsi rakyat baik masalah alam maupun kebijakan telah menjadi faktor penyebab krisis pangan, termasuk penipisan tanah, ketidakmampuan mengimpor pupuk, memburuknya distribusi infrastruktur, dan menurunnya bantuan pangan dari Negara-negara blok sosialis. Bahkan sebelum bencana banjir pada tahun 1995 Korea Utara sudah mengajukan permohonan bantuan pangan dari beberapa negara¹³. Dengan krisis pangan yang meluas, disusul bencana banjir Juli Agustus 1995 yang telah menghancurkan produksi pangan di Korea Utara.

Berdasarkan data PBB pada Desember 1995, bencana banjir telah mengakibatkan 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan miskinnya 100.000 keluarga. Gagal panen diperkirakan 1,5 juta ton, yang menyebabkan bencana kelaparan. Untuk pertama kalinya pemerintah Korea Utara, meminta bantuan internasional dan pada bulan Januari 1996, Badan Pangan Dunia, World Food Programme, sebagai satu-satunya lembaga kemanusiaan internasional yang pertama memasuki negara itu membuka kantor di Pyongyang.

Di tahun 2002, pemerintah Korea Utara mengizinkan perdagangan oleh petani secara pribadi untuk mulai menjual berbagai macam hasil pertanian.

¹³ Food agriculture Organization of the United Nation/ World Food Programme, "Special Alert No.276," May 13, 196, p.2

Pemerintah juga mengizinkan beberapa petani swasta untuk dijadikan sebagai dasar percobaan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Pada bulan oktober 2005, pemerintah Korea Utara berusaha merubah kebijakannya dengan melarang penjualan beras secara pribadi. Di bulan desember 2005, pemerintah menghentikan hampir semua bantuan kemanusiaan di Korea Utara dan membatasi kegiatan organisasi internasional dan bantuan organisasi non pemerintah seperti Badan Pangan Dunia. Bantuan pangan utama hanya datang dari China dan Korea Selatan dalam bentuk hibah dan kelonggaran pinjaman jangka panjang.

Pada bulan Mei 2008, Amerika Serikat memberikan bantuan 500.0000 Ton makanan kepada Korea Utara melalui Badan Pangan Dunia dan organisasi non pemerintah, dan Pyongyang mulai menerima bantuan ini pada pertengahan tahun 2008. Pemerintah Korea Selatan juga membantu membangun infrastruktur, sumber daya alam, dan industry ringan Korea Utara meskipun kerjasama antar Korea mengalami penurunan sejak Korea Utara membatasi pariwisata dan pabrik-pabrik gabungan di Utara dan sejak Pemerintah Korea menunda pemberian bantuan makanan kepada Korea Utara.